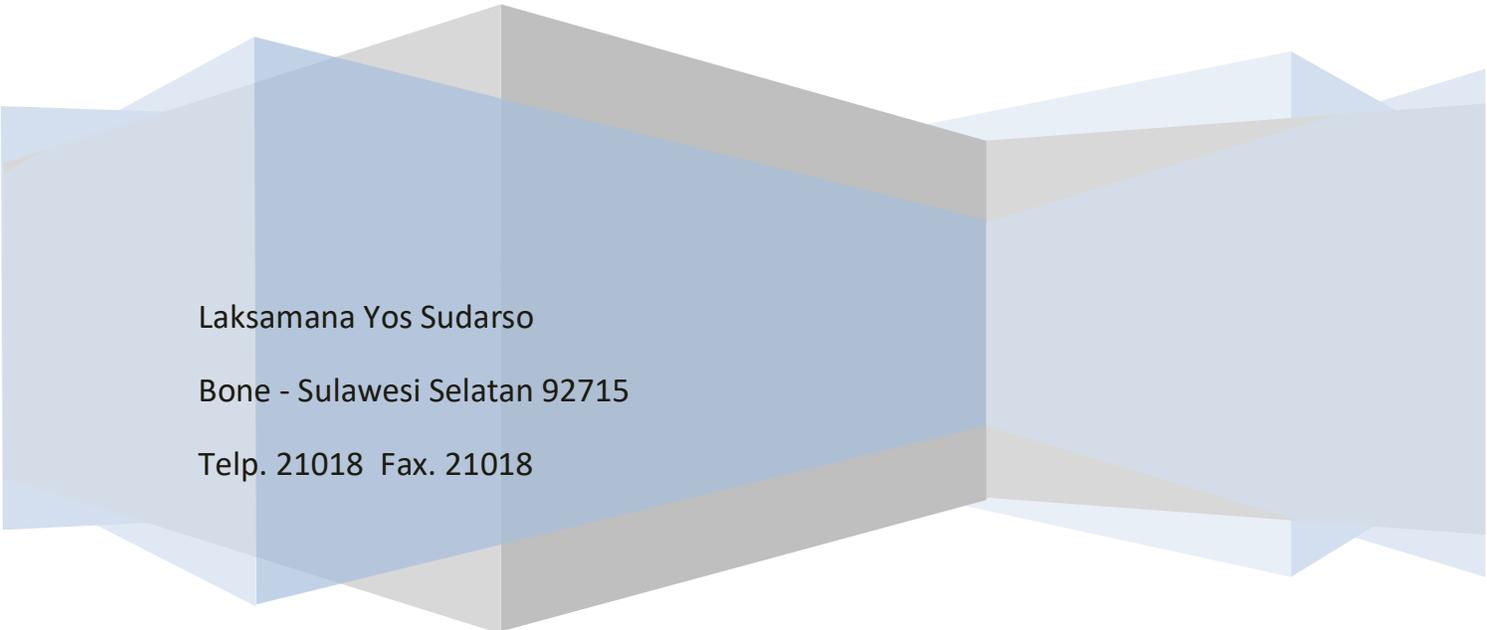


# **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

# **LAPORAN KEUANGAN**

# **307509**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017**



Laksamana Yos Sudarso  
Bone - Sulawesi Selatan 92715  
Telp. 21018 Fax. 21018



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Laksamana Yos Sudarso**  
**Telp. 21018 Fax. 21018**  
**Bone - Sulawesi Selatan 92715**  
**e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bone, 7 Januari 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi  
NIP.197412142006041002

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca .....	16
III. Laporan Operasional .....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	24
A. Penjelasan Umum .....	24
A.1. Dasar Hukum .....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone .....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	26
A.4. Basis Akuntansi .....	27
A.5. Dasar Pengukuran .....	27
A.6. Kebijakan Akuntansi .....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	35
B.2. Belanja .....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	40
C.1. Aset Lancar .....	40
C.2. Aset Tetap .....	42
C.3. Aset Lainnya .....	46
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	47
C.6. Ekuitas .....	48

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	48
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	48
D.2.	Beban Pegawai .....	48
D.3.	Beban Persediaan .....	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	50
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	50
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	51
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	51
D.8.	Kegiatan Non Operasional .....	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
E.1.	Ekuitas Awal .....	53
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	53
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset .....	53
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	53
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	54
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	54
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	54
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	54
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	55
E.3.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	55
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	56
	Daftar dan Lampiran .....	58
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	59
	Daftar Hibah Langsung.....	62

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama Watampone

Laksamana Yos Sudarso Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018 e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bone, 7 Januari 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

  
H.A. FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE,MSi  
NIP.197412142006041002

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.204.482 atau mencapai 99,99 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp12.205.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp8.270.572.169 atau mencapai 99,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.301.057.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.781.211.386 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp103.400; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp5.781.107.986; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp8.455.627 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp8.455.627 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp5.772.755.759, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp5.772.755.759 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) - LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11.154.134, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8.308.582.445 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(8.297.428.311) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp1.214.048 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(8.296.214.263)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp5.790.612.332 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(8.296.214.263) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.258.367.687 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp5.752.765.756.

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	12.205.000	12.204.482	99,99	11.224.866
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>12.205.000</b>	<b>12.204.482</b>	<b>99,99</b>	<b>11.224.866</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	7.295.610.000	7.293.120.670	99,97	5.796.885.219
2.	Belanja Barang	B.2.2.	780.447.000	752.574.499	96,43	624.379.155
3.	Belanja Modal	B.2.3.	225.000.000	224.877.000	99,95	292.922.300
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>8.301.057.000</b>	<b>8.270.572.169</b>	<b>99,63</b>	<b>6.714.186.674</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	3.046.770
Persediaan	C.1. 3.	103.400	347.500
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>103.400</b>	<b>3.394.270</b>
<b>Aset Tetap</b>			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	1.582.240.000	1.582.240.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.823.896.028	1.599.019.028
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4.642.914.000	4.642.914.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	19.988.100	19.988.100
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	14.997.470	14.997.470
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.302.927.612)	(2.065.023.980)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>5.781.107.986</b>	<b>5.794.134.618</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
C.4			
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	288.738.237	288.738.237
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(288.738.237)	(288.738.237)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>5.781.211.386</b>	<b>5.797.528.888</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28.445.630	6.916.556
Jumlah Kewajiban		28.445.630	6.916.556
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		5.752.765.756	5.790.612.332
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		5.781.211.386	5.790.612.332

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	11.154.134	11.224.866
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	7.315.555.181	5.794.440.711
Beban Persediaan	D. 3	33.069.337	27.136.750
Beban Barang dan Jasa	D. 4	386.524.839	334.946.115
Beban Pemeliharaan	D. 5	287.189.456	221.600.084
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	48.340.000	48.340.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	237.903.632	233.121.136
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>8.308.582.445</b>	<b>6.659.584.796</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(8.297.428.311)</b>	<b>(6.648.359.930)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	1.050.000	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		164.648	1.607.500
<b>Defisit Selisih Kurs</b>			

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.214.048	1.607.500
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNBPN		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(8.296.214.263)	(6.646.752.430)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas Awal	E. 1	5.790.612.332	5.733.833.050
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(8.296.214.263)	(6.646.752.430)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			4
<b>Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	8.258.367.687	6.703.531.708
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>5.752.765.756</b>	<b>5.790.612.332</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

---

### A. Penjelasan Umum

---

#### A.1. Dasar Hukum

---

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah Visi Pengadilan Agama Watampone adalah

MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG

Misi Pengadilan Agama Watampone adalah

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Watampone melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat mendukung dalam sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal
3. Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
4. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas
2. Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerimaan  
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

---

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4.) Beban**

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5.) Aset**

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah :  
Rp12.204.482*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 12.204.482 atau mencapai 99,55 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.205.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Watampone adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.050.000	1.050.000	100,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.495.042	4.495.042	100,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.000	348	34,80
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.659.000	6.659.092	100,00
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>12.205.000</b>	<b>12.204.482</b>	<b>99,99</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 12.204.482 atau mencapai 99,99 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.205.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 979.616 atau 8,72 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan dari penghapusan BMN.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017 dan 2016  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.050.000	0	1.050.000	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.495.042	3.502.510	992.532	28,33
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	348	0	348	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.659.092	7.722.322	(1.063.230)	(13,76)
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	34	(34)	(100,00)
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>12.204.482</b>	<b>11.224.866</b>	<b>979.616</b>	<b>0,00</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja Negara :*  
Rp  
8.270.572.169

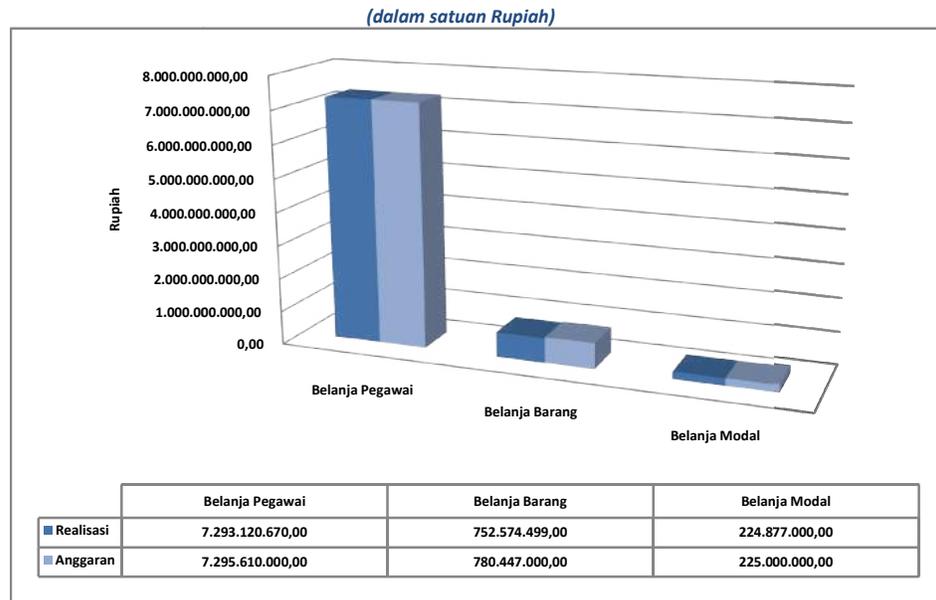
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Watampone per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 8.270.572.169 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,63% dari anggaran senilai Rp. 8.301.057.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.295.610.000	7.293.120.670	99,97
Belanja Barang	780.447.000	752.574.499	96,43
Belanja Modal	225.000.000	224.877.000	99,95
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>8.301.057.000</b>	<b>8.270.572.772</b>	<b>99,63</b>
Pengembalian Belanja		(603)	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>8.301.057.000</b>	<b>8.270.572.169</b>	<b>99,63</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.556.385.495 atau sebesar 23,18 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Adanya Kenaikan Kelas Pengadilan Agama Watampone dari Kelas I B menjadi Kelas I A, sehingga mengalami kenaikan tunjangan gaji Hakim dan pejabat Fungsional
2. Kenaikan belanja barang

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	7.293.120.670	5.796.885.219	1.496.235.451	25,81
Belanja Barang	752.574.499	624.379.155	128.195.344	20,53
Belanja Modal	224.877.000	292.922.300	(68.045.300)	(23,22)
<b>Total Belanja</b>	<b>8.270.572.169</b>	<b>6.714.186.674</b>	<b>1.556.385.495</b>	<b>23,18</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Watampone per 31 Desember TA 2017

7.293.120.67  
0

dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 7.293.120.670 dan Rp. 5.796.885.219.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 25,81 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kenaikan Kelas Pengadilan Agama Watampone dari Kelas I B menjadi Kelas I A, sehingga mengalami kenaikan tunjangan gaji Hakim dan pejabat Fungsional
2. Adanya mutasi kenaikan pangkat PNS

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.167.765.200	2.078.598.800	89.166.400	4,29
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.787	23.709	(1.922)	(8,9)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	131.566.280	122.239.630	9.326.650	7,63
Beban Tunj. Anak PNS	42.358.706	35.751.626	6.607.080	18,48
Beban Tunj. Struktural PNS	36.600.000	33.440.000	3.160.000	9,44
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.731.565.000	2.529.600.000	1.201.965.000	47,51
Beban Tunj. PPh PNS	511.099.317	369.418.754	141.680.563	38,35
Beban Tunj. Beras PNS	89.726.380	85.817.700	3.910.680	4,55
Beban Uang Makan PNS	316.761.000	288.760.000	28.001.000	9,69
Beban Tunjangan Umum PNS	2.405.000	6.055.000	(3.650.000)	(60,28)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	263.250.000	202.500.000	60.750.000	30,00
Beban Uang Lembur	0	44.680.000	(44.680.000)	(100,00)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>7.293.120.670</b>	<b>5.796.885.219</b>	<b>1.496.235.451</b>	<b>25,81</b>
Pengembalian Belanja	(603)	0	(603)	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>7.295.564.575</b>	<b>5.794.440.711</b>	<b>1.501.123.864</b>	<b>25,81</b>

## B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp752.574.49  
9

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Watampone per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 752.574.499 dan Rp. 624.379.155.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 20,53 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terlaksananya realisasi belanja barang yang meningkat
  2. Perencanaan pengelolaan belanja barang yang meningkat
- Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017 Realisasi	TA 2016 Realisasi	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	307.906.650	254.321.525	53.585.125	21,06
Belanja Barang Non Operasional	5.635.000	5.635.000	0	0,00
Belanja Jasa	386.524.839	334.946.115	51.578.724	3,15
Belanja Pemeliharaan	287.068.556	221.600.064	65.468.492	30,66
Belanja Perjalanan Dinas	48.340.000	48.340.000	0	0,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>752.574.499</b>	<b>624.379.155</b>	<b>128.195.344</b>	<b>20,53</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>752.574.499</b>	<b>624.379.155</b>	<b>128.195.344</b>	<b>20,53</b>

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi  
Belanja Modal  
:  
Rp224.877.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Watampone per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 224.877.000 dan Rp. 292.922.300.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar (23,22) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan karena belanja modal tahun 2016 lebih besar dari pada belanja modal tahun 2017. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	224.877.000	272.934.200	(48.057.200)	99,97
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Perbaikan Ringan	0	19.988.100	(19.988.100)	(100,00)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>224.877.000</b>	<b>292.922.300</b>	<b>(68.045.300)</b>	<b>(23,22)</b>

Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	224.877.000	292.922.300	(68.045.300)	(23,22)

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:  
Rp 103.400

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp103.400 dan Rp3.394.270.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Watampone per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	3.046.770
Persediaan	103.400	347.500
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>103.400</b>	<b>3.394.270</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016
-----	-------	---------------------	---------------------

1.	Kas di Brandkas	0	0
2.	Kas di Rekening	0	0
Jumlah		0	0

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp3.046.770. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

#### Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016
1.	Persekot Gaji	0	3.046.770
Jumlah		0	03.046.770

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp103.400*

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp103.400 dan Rp347.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

#### Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	103.400	347.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0

6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>103.400</b>	<b>347.500</b>

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
5.781.107.986*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp5.781.107.986 dan Rp. 5.794.134.618. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

### Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	1.582.240.00	1.582.240.00	0
2	Peralatan dan Mesin	1.823.896.028	1.599.019.028	224.877.000
3	Gedung dan Bangunan	4.642.914.000	4.642.914.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	19.988.100	19.988.100	0
5	Aset Tetap Lainnya	14.997.470	14.997.470	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>8.084.035.598</b>	<b>6.276.918.598</b>	<b>224.877.000</b>
Akumulasi Penyusutan		(2.302.927.612)	(2.065.023.980)	(237.903.632)
Nilai Buku Aset Tetap		5.781.107.986	5.794.134.618	(13.026.632)

### C.2.1. Tanah

*Tanah:  
Rp1.582.240.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah

sebesar Rp.1.582.240.000 dan Rp. 1.582.240.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

**Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.308 m2	14/1982	Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	460.000.000
2.	2	3.424.m2	13/2014	Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor Permanen PA. Watampone	1.122.240.000
<b>Jumlah</b>						<b>1.582.240.000</b>

**C.2.2. Peralatan dan Mesin**

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
1.823.896.028*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.1.823.896.028 dan Rp. 1.599.019.028

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	1.599.019.028
<b>Mutasi Tambah</b>	
	<b>224.877.000</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
	<b>288.738.237</b>
Saldo per 31 Desember 2017	1.823.896.028
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(1.372.115.428)
Nilai Buku 31 Desember 2017	451.780.600

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 224.877.000 dan Rp. 292.922.300. yang terdiri dari :

1	P.C. Unit sebanyak 4 unit	@ 9.975.000	= Rp.39.900.000
2.	A.C. Split 1 PK sebanyak 3 unit	@4.719.000	= Rp.14.157.000
3.	A.C. Split 2 PK sebanyak 2 unit	@7.260.000	= Rp.14.520.000
4.	Lap Top sebanyak 1 unit	@15.000.000	= Rp.15.000.000

5.	Printer sebanyak 4 unit	@2.500.000	= Rp.1.000.000
6.	TV. LED sebanyak 1 unit	@20.000.000	= Rp.20.000.000
7.	UPS sebanyak 2 unit	@10.000.000	= Rp.20.000.000
8.	Meja Kerja Kayu Hakim sebanyak 10 buah	@5.610.000	=Rp.56.100.000
9.	Kursi Hakim sebanyak 10 buah	@3.520.000	=Rp. 35.200.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan :  
Rp4.642.914.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.4.642.914.000 dan Rp. 4.642.914.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	4.642.914.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
	0
Saldo per 31 Desember 2017	4.642.914.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	929.812.780
Nilai Buku 31 Desember 2017	3.713.101.220

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan :  
Rp19.988.100*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.988.100 dan Rp.19.988.100.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	19.988.100
<b>Mutasi Tambah</b>	
	0
<b>Mutasi Kurang</b>	

	0
Saldo per 31 Desember 2017	19.988.100
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	999.404
Nilai Buku 31 Desember 2017	18.988.696

Saldo tersebut terdiri dari penambahan daya listrik pada tahun 2016 Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya:  
Rp14.997.470*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.14.997.470 dan Rp. 14.997.470.

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada tahun 2017

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	14.997.470
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2017	14.997.470
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2017	14.997.470

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp[2.302.927.612]* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(2.302.927.612) dan Rp(2.065.023.980).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,823,896,028	1,372,115,428	451,780,600
2	Gedung dan Bangunan	4,642,914,000	929,812,780	3,713,101,220
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	19,988,100	999,404	18,988,696
4	Aset Tetap Lainnya	14,997,470	0	14,997,470
	Jumlah	6.501.795.598	2,302,927,612	4.198.867.986

*Aset Lainnya:  
Rp 0*

### C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0 Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0

Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
Nilai buku Aset Lainnya	0	0

#### C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp 0* Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 288.738.237. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Watampone serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	288.738.237
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	(288.738.237)
Saldo per 31 Desember 2017	0

Transaksi pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: Penghapusan Peralatan dan Mesin senilai 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Pare-Pare, Nomor : 174/2017 tanggal 19 Juni 2017

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

#### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 0* Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang Kepada  
Pihak Ketiga:  
Rp8.455.627* Utang Kepada pihak ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar

Rp.8.455.627 dan Rp.6.916.556. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja barang yang masih tahun 2017 yang masih harus dibayar pada tahun 2018. Utang kepada pihak ketiga adalah Langganan Daya Listrik, Internet Telepon dan Air pada bulan Desember tahun 2017.

## C.6. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:  
Rp 0*

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp :  
Rp12.204.482*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp12.204.482 dan Rp11.224.866. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.050.000	1.050.000	100,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.549.000	4.495.042	98,81
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.000	348	34,80
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.659.000	6.659.092	100,00
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>12.205.000</b>	<b>12.204.482</b>	<b>99,99</b>

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
: Rp  
7.295.565.178*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.295.565.178 dan Rp5.794.440.711. Beban Pegawai adalah

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.169.957.199	2.076.406.801	93.550.398	4,50
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.822	23.674	(1.852)	(7,82)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	131.785.480	122.020.430	9.765.050	8,00
Beban Tunj. Anak PNS	42.391.980	35.718.352	6.673.628	18,68
Beban Tunj. Struktural PNS	36.600.000	33.440.000	3.160.000	9,44
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.731.565.000	2.529.600.000	1.201.965.000	47,51
Beban Tunj. PPh PNS	511.099.317	369.418.754	141.680.563	38,35
Beban Tunj. Beras PNS	89.728.380	85.817.700	3.910.680	4,55
Beban Uang Makan PNS	316.761.000	288.760.000	28.001.000	9,69
Beban Tunjangan Umum PNS	2.405.000	6.055.000	(3.650.000)	(60,28)
Beban Tunjangan Kemahalan	263.250.000	202.500.000	60.750.000	30,00
<b>Hakim</b>				
Beban Uang Lembur	0	44.680.000	(44.680.000)	(100,00)
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>7.295.565.178</b>	<b>5.794.440.711</b>	<b>1.501.124.467</b>	<b>25,81</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan :  
Rp33.184.837*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.33.184.837 dan Rp.27.136.750. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	33.069.337	27.136.750	5.932.587	21,86
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	115.500	0	115.500	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>33.184.837</b>	<b>27.136.750</b>	<b>6.048.087</b>	<b>21,86</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :  
Rp386.524.839*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp386.524.839 dan Rp334.946.115. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	217.773.950	182.050.000	35.723.950	19,62
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.288.800	699.675	589.125	84,19
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.960.000	52.560.000	5.400.000	10,27
Beban Barang Operasional Lainnya	31.797.700	19.011.850	12.785.850	67,25
Beban Bahan	5.635.000	5.635.000	0	0
Beban Langganan Listrik	57.963.027	53.514.088	4.448.939	8,31
Beban Langganan Telepon	4.272.362	11.606.002	(7.333.640)	(63,18)
Beban Langganan Air	9.834.000	9.869.500	(35.500)	(0,35)
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>386.524.839</b>	<b>334.946.115</b>	<b>51.578.724</b>	<b>15,40</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:  
Rp287.068.556*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp287.068.556 dan Rp221.600.084. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193.359.362	123.300.890	70.058.472	56,81
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.702.294	89.699.994	2.300	0
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	3.625.500	(3.625.500)	(100)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.006.900	4.973.700	(966.800)	(19,43)
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>287.068.556</b>	<b>221.600.084</b>	<b>65.468.472</b>	<b>29,54</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp48.340.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp48.340.000 dan Rp48.340.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	48.340.000	48.340.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>48.340.000</b>	<b>48.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi :  
Rp237.903.632*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp237.903.632 dan Rp233.121.136. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	144.545.650	139.488.154	5.057.496	3,62
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.858.280	92.858.280	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	499.702	499.702	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	275.000	(275.000)	(100)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>237.903.632</b>	<b>233.121.136</b>	<b>4.782.496</b>	<b>2,05</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
<b>Jumlah Amortisasi</b>				
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>237.903.632</b>	<b>233.121.136</b>	<b>4.782.496</b>	<b>2,05</b>

## D.8. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp1.050.000

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari pemindahan BMN Lainnya	1.050.000	0	1.050.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	384	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	158.300	1.607.500	(1.448.852)	(90,13)

Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	1.208.648	1.607.500	(398.852)	90,15

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.772.755.759 dan Rp5.790.612.332

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(8.276.224.260) dan Rp(6.646.752.430) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 Dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.258.367.687 dan Rp6.703.531.708  
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(12.204.482)
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.270.572.169
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>8.258.367.687</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp(12.204.482) sedangkan DKEL sebesar Rp 8.270.572.169

### **E.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.772.755.759 dan Rp5.790.612.332

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

## **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK selama Tahun Anggaran 2017

### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja barang langganan daya Listrik bulan Desember 20017 sebesar Rp.6.388.233
2. Terdapat belanja barang langganan Air bulan Desember 20017 sebesar Rp.835.500
3. Terdapat belanja barang langganan Telpon bulan Desember 20017 sebesar Rp.318.094
4. Terdapat belanja barang langganan daya Internet bulan Desember 20017 sebesar Rp.913.800

### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Watampone adalah:

1. BRI Cab. Watampone A/C 0111-01-000120-30-6 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.
2. BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.
3. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.397.408.571.

### **F.2.4. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi I dan ke II adalah Perubahan Rencana Penarikan Dana

2. Revisi ke III adalah perubahan akun Belanja Modal Anti virus 536111 menjadi 521119
3. Revisi ke IV adalah revisi pagu minus belanja pegawai

### F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB:

1. Terdapat ralat PNPB tanggal 13 September 2017 dengan nomor NTPN :
  - B4F1F1K5A2VGGF8I
  - CBA041JU4O56SR8I
  - DF0191K1DQ7J5S8Iyang disebabkan salah kode Satker saat penyetoran, semula **307509** menjadi **309076**.
2. Terdapat ralat PNPB tanggal 20 September 2017 dengan nomor NTPN :
  - 3DB5B65HA4OBPGK2
  - DFFA365L2TO06NK2
  - E8AF865N9KRKPIK2yang disebabkan salah kode Satker saat penyetoran, semula **307509** menjadi **309076**.
3. Terdapat ralat PNPB tanggal 25 September 2017 dengan nomor NTPN :
  - 525137NNBNBCUKEI
  - 538D07NKNT4MTKEI
  - BE3AC7N6JKCK1IEIyang disebabkan salah kode Satker saat penyetoran, semula **307509** menjadi **309076**.
4. Terdapat ralat PNPB tanggal 9 Oktober 2017 dengan nomor NTPN :
  - 6799C6S3MEAVU0OI,
  - AB86C6SFQVG01VOI
  - B7ECC6S9196K5JOIyang disebabkan salah kode Satker saat penyetoran, semula **307509** menjadi **309076**.

### F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terjadi perubahan ataupun penggantian Pejabat Pengelola Keuangan selama tahun 2017 :

Kuasa Pengguna	: H.A. Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Nurhidayah, S.Ag
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Maftukhah Mustafa, S.Kom
Bendahara	: Heriawati

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Agama Watampone**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2016	2017	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1.836.086.028</b>	<b>1.239.759.778</b>	<b>144.545.650</b>	<b>1.384.305.428</b>	<b>451.780.600</b>
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	455,024,828	417,524,828	25.000.000	442.524.828	12.500.000
2	Alat Kantor	5	207,045,200	149,647,060	17.578.040	167.225.100	39.820.100
3	Alat Rumah Tangga	5	598,317,800	419,707,590	27.770.560	447.478/150	150.839.650
4	Alat Studio	5	24,995,000	4,995,000	4.000.000	8.995.000	16.000.000
5	Alat Komunikasi	5	25,345,000	20,846,000	4.499.000	15.345.000	0
6	Alat Kedokteran	5	0	0	0	0	0
7	Peralatan Pemancar	8	149,985,000	14,998,500	14.998.500	29.997.000	119.988.000
8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15	0	0	0	0	0
9	Komputer Unit	4	245,456,000	116,249,625	39.949.00	156.198.625	89.257.375
1	Peralatan Komputer	4	129,917,200	95,791,175	10.750.550	106.541.725	23.375.475
1	Peralatan Olah Raga	3	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>4.642.914.000</b>	<b>836.954.500</b>	<b>92.858.280</b>	<b>929.812.780</b>	<b>3.713.101.220</b>
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	4.044.841.000	760.469.830	80.896.820	841.366.650	3.203.474.350

2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	545.674.000	65.480.880	10.913.480	76.394.360	469.279.640
3	Tugu/tanda Batas	50	52.399.000	11.003.790	1.047.980	12.051.770	40.347.230
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		19.988.100	499.702	499.702	999.404	18.988.696
1	Jaringan Listrik		19.988.100	499.702	499.702	999.404	18.988.696
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		6.498.988.128	2.369.663.217	237.903.632	2.315.117.612	4.183.870.516
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		6.498.988.128	2.369.663.217	237.903.632	2.315.117.612	4.183.870.516

## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Agama Watampone**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
	Jumlah :						